

Ideologi Negara Sebagai Perekat dan Kesatuan Bangsa

Amanda Anggraini Tinasyah

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 24050110139@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Ideologi negara, Kesatuan Bangsa
Perekat Nasional, Persatuan
Bangsa, Integrasi Nasional

Keywords:

National Ideology, National
Integrity, National Unifier,
National Unity, National
Integration

ABSTRAK

Ideologi negara memiliki posisi yang sangat krusial dalam menyatukan dan memperkokoh kesatuan suatu bangsa. Sebagai kumpulan nilai dan prinsip yang dipahami secara bersama, ideologi negara berfungsi sebagai dasar moral dan filosofis yang menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya ideologi, masyarakat bisa memiliki visi dan tujuan yang seragam, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Penerapan ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi untuk menciptakan rasa kebersamaan, saling

menghargai, dan kerja sama yang kokoh. Contohnya, di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara berperan untuk mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya, sehingga membangun keharmonisan di dalam masyarakat. Namun, suksesnya ideologi ini sangat tergantung pada pelaksanaannya yang konsisten. Tanpa penerapan yang efisien, nilai-nilai tersebut tidak akan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk memahami dan mengamalkan ideologi negara dalam rangka mencapai bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

ABSTRACT

State ideology has a very crucial position in uniting and strengthening the unity of a nation. As a collection of shared values and principles, state ideology serves as a moral and philosophical foundation that unites various groups in society. With an ideology, people can have a uniform vision and goal, despite coming from different backgrounds. The application of state ideology in everyday life contributes to creating a sense of togetherness, mutual respect and solid cooperation. For example, in Indonesia, Pancasila as a state ideology plays a role in overcoming ethnic, religious and cultural differences, thus building harmony in society. However, the success of this ideology largely depends on its consistent implementation. Without efficient implementation, these values will not be realized in people's lives. Therefore, it is very important for every individual to understand and practice the state ideology in order to achieve a more advanced and prosperous nation.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang terkenal dengan keanekaragaman yang sangat luar biasa. Dengan memiliki lebih dari 1. 300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan beragam agama serta kepercayaan yang dianut oleh warganya, Indonesia menjadi salah satu contoh konkret dari keragaman sosial budaya di dunia. Namun, keanekaragaman ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, ideologi negara berperan sebagai pengikat yang menyatukan seluruh elemen masyarakat. Pancasila, sebagai ideologi resmi negara Indonesia, tidak hanya menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tetapi juga berfungsi sebagai cara pandang hidup yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap menjaga harmoni di tengah perbedaan.

Pancasila muncul dari proses panjang perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila dirumuskan untuk mencerminkan nilai-nilai mulia yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan pokok dari pandangan hidup bangsa. Kelima sila ini saling terhubung dan berfungsi sebagai pedoman bagi setiap warga negara untuk hidup berdampingan dengan harmonis. Sebagai perekat sosial, Pancasila berperan penting dalam menghadapi potensi konflik yang mungkin timbul akibat keberagaman di Indonesia. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, perbedaan sering kali menjadi pemicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Pancasila ada untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok diperlakukan dengan hormat dan memiliki tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan yang terdapat dalam Pancasila menjadi landasan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas nasional. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, identitas nasional sering kali terancam oleh pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai saluran komunikasi modern. Generasi muda, terutama, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai nasional tetap terjaga di tengah arus perubahan global. Pancasila memberikan kerangka kerja bagi masyarakat Indonesia untuk tetap berpijak pada nilai-nilai lokal sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun demikian, tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai perekat bangsa tidaklah mudah. Di era digital saat ini, informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa adanya penyaringan yang memadai. Berita bohong dan ujaran kebencian sering kali menjadi penyebab perpecahan di tengah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal maupun informal menjadi sangat penting. Generasi muda perlu diperlengkapi dengan kemampuan literasi digital agar mampu memilah informasi yang valid dan tidak terjebak dalam narasi provokatif yang dapat merusak persatuan bangsa.

Fungsi pemerintah juga sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten dalam kebijakan publik. Pemerintah harus dapat menciptakan kebijakan yang adil dan merata sehingga setiap warga negara merasa terlibat dalam proses pembangunan nasional. Ketimpangan sosial ekonomi sering kali merupakan sumber konflik yang bisa mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus direalisasikan melalui program-program konkret yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

Secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya memberikan pedoman bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman. Di tengah tantangan globalisasi serta era digital saat ini, peran Pancasila semakin penting sebagai perekat sosial sekaligus identitas nasional. Dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat terus mempertahankan keutuhan bangsanya sambil menghadapi berbagai tantangan zaman dengan percaya diri dan optimisme yang tinggi.

Tujuan dan Metode

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh peran Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi landasan perekatan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila diharapkan dapat mengatasi perbedaan serta membangun rasa kebersamaan di antara semua elemen bangsa. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pentingnya penelitian ini juga terletak pada usaha untuk mempertahankan relevansi Pancasila di zaman modern, di mana dampak budaya asing dan aliran informasi yang cepat dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan. Dengan memahami cara Pancasila dapat terus diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, penelitian ini berusaha memberikan solusi agar ideologi tersebut tetap menjadi pengikat sosial yang kuat dan mampu menghadapi dinamika zaman. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Metode yang diterapkan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Penulis mengumpulkan serta menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel akademis, dan dokumen resmi yang membahas Pancasila dan keragaman sosial budaya Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengelompokkan informasi penting yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila serta tantangan yang dihadapi. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan contoh-contoh nyata dari masyarakat sebagai ilustrasi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa, menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Ideologi negara berfungsi sebagai dasar pemersatu. Pancasila, yang merupakan hasil konsensus nasional dan mengakomodasi nilai-nilai luhur bangsa, menjadi pedoman moral sosial dan dasar negara. Pancasila, terdiri dari lima sila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial berfungsi sebagai pijakan untuk membangun kehidupan berbangsa yang harmonis. Nilai-nilai tersebut mendorong masyarakat untuk saling menghormati, berkolaborasi, dan mengedepankan musyawarah. Dalam perjalanan sejarahnya, nilai-nilai Pancasila telah mengalami proses pematangan, sehingga para tokoh bangsa menjadikannya sebagai dasar negara karena setiap

elemennya mengandung makna tentang nilai ketuhanan, sikap toleransi, serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. "Pancasila sebagai dasar negara merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara." (MD Mahfud, 2017)

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini diperlukan agar tercipta kehidupan berbangsa yang harmonis, adil, dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Internaliasi nilai Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian mereka. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman moral yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Sebagaimana ditegaskan, "Pancasila merupakan prinsip dasar dimana didalamnya terkandung kualitas tertentu, harapan dan cita-cita yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk kemudian diwujudkan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan." (Dwi Adityo, 2022)

Identitas nasional yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, memperkuat stabilitas sosial, serta mendorong masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, identitas nasional diwujudkan melalui penghormatan terhadap simbol-simbol negara, pelestarian budaya, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kebangsaan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ideologi negara dan memperkuat identitas nasional, membentuk karakter yang toleran, adil, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter di dalam kelas, serta kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Muspida menjadi elemen penting dalam menanamkan sikap nasionalisme.

Di zaman modern ini, globalisasi, kemajuan teknologi, dan dampak budaya luar dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan. Polarisasi politik serta penyebaran informasi yang keliru juga bisa memicu perpecahan. Namun, dengan memperkuat ideologi negara dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia diyakini mampu mengatasi berbagai tantangan. Di zaman milenial ini, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah ide-ide baru yang bernilai negatif yang dapat merusak kepribadian bangsa dan menurunkan sikap nasionalisme pada generasi-generasi penerus bangsa Indonesia (Miftahusyai et al., 2021). Selain berfungsi sebagai alat pemersatu, ideologi negara juga berperan sebagai pembeda yang menegaskan keunikan bangsa Indonesia di hadapan dunia. Keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat merupakan kekayaan yang harus dilestarikan dan dipromosikan. Identitas nasional yang kokoh akan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional serta membangun citra yang positif.

Upaya untuk memperkuat ideologi negara sebagai pemersatu dan kesatuan bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan kebangsaan, dialog antarbudaya, promosi simbol-simbol nasional, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Dalam konteks identitas nasional, menekankan perlunya membangun keberlanjutan dan kedaulatan. Identitas nasional tidak hanya berperan sebagai pembeda, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun masa depan bangsa yang kuat dan berdaulat (Faslah,

2024). Ini mengindikasikan bahwa identitas nasional tidak hanya sebagai simbol atau atribut, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Identitas nasional berfungsi sebagai basis untuk membangun keberlanjutan dan kedaulatan bangsa di tengah perubahan global.

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dipahami sebagai sebuah gagasan yang berisi pandangan mendasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mencakup nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu pola pikir dan pola kerja perjuangan (Hamja, 2017). Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar rumusan konsep, melainkan juga gambaran dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Ideologi terbuka seperti Pancasila, menurut Hamja nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya dari masyarakatnya sendiri. Selain itu, juga digarisbawahi pentingnya komitmen para penyelenggara negara dalam menjaga ideologi Pancasila. Semangat para pemimpin pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila, Pancasila memiliki seperangkat nilai, yaitu keilahan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan" (Aryani et al., n.d.). Dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila perlu menjadi dasar dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terbatas pada sisi ideologis dan moral, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, pemerintah dapat meningkatkan mutu layanan publik, mengurangi korupsi, dan memperbaiki kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, dalam upaya mempertahankan persatuan bangsa, penerapan nilai-nilai Pancasila terutama nilai persatuan menjadi kunci untuk memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan cara ini, Pancasila dapat terus berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu bangsa. Namun, tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi dan modernisasi, yang membawa pengaruh budaya asing dan ideologi transnasional, harus dihadapi dengan serius agar nilai-nilai kebangsaan kita tidak tergeser.

Namun, terdapat tantangan dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang masih ada, terutama di dalam era globalisasi dan modernisasi. Pengaruh budaya luar dan ideologi transnasional bisa melemahkan nilai-nilai kebangsaan jika tidak dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman serta praktik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, ideologi negara, khususnya Pancasila, telah terbukti menjadi pondasi yang solid dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya harus terus diinternalisasi dan diterapkan oleh seluruh masyarakat supaya Indonesia tetap menjadi bangsa yang kokoh, bersatu, dan berdaulat di tengah dinamika global. Penanaman kembali rasa nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda, menjadi sangat penting untuk mempertahankan semangat kebangsaan.

Implementasi ideologi negara, terutama Pancasila, tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah dan pejabat negara, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati toleransi antarumat beragama, mempertahankan persatuan dalam keberagaman, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sikap ini mencerminkan pemahaman bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka yang berkembang dari kekayaan budaya dan moral bangsa sendiri, sehingga setiap warga negara dapat menemukan dirinya di dalamnya. Para pejabat negara dan penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi strategis dalam menjaga serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan konsisten. Komitmen mereka dalam melaksanakan tugas harus berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar utama, yang kemudian menerangi penerapan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila harus mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi, sekaligus memperkuat persatuan bangsa melalui perlakuan hukum yang adil dan beradab.

Selain itu, dalam konteks demokrasi, keikutsertaan aktif masyarakat sangat penting sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Masyarakat yang mandiri, dewasa, serta bertanggung jawab dapat berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berbudaya Pancasila. Lewat pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat dibentuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter, yang mampu menjaga serta meneruskan nilai-nilai luhur bangsa (Hamja, 2017) .Penerapan prinsip-prinsip Pancasila juga harus direfleksikan dalam etika politik yang berbasiskan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika politik ini berfungsi sebagai panduan bagi pejabat dan masyarakat dalam bersikap dan bertindak, sehingga terwujud kultur politik yang beradab dan bermoral. Kejujuran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab menjadi faktor utama dalam melaksanakan norma-norma politik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta menghindarkan dari konflik yang bersifat sektarian dan emosional. Dengan demikian, penerapan ideologi negara yang efektif memerlukan kolaborasi antara masyarakat dan pejabat negara. Masyarakat yang sadar dan berpartisipasi serta pejabat yang memiliki integritas dan komitmen akan menjadikan Pancasila sebagai pengikat dan dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini krusial agar Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tantangan zaman dan mampu merealisasikan cita-cita nasional yang adil dan makmur.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah hanya sekadar rangkaian kata-kata atau hafalan semata, melainkan merupakan sistem pemikiran yang mencakup pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia. Ia adalah inti dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keunikan Pancasila sebagai ideologi terbuka terletak pada sumbernya, yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan dikembangkan dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia

dan dapat diakses oleh setiap warga negara di dalamnya, sebagai kesepakatan yang mengikat semua elemen bangsa.

Oleh sebab itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan Pancasila tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah semata, tetapi juga harus menjadi kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral seluruh warga negara. Setiap individu, dalam kapasitasnya masing-masing, memiliki peran aktif untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan perilaku sehari-harinya. Hal ini mencakup menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menghargai harkat dan martabat setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan, memperkuat persatuan Indonesia dengan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu, menjunjung tinggi prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan. Para penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap relevan dan aktual dalam setiap kebijakan serta tindakan yang diambil. Semangat pengabdian dan komitmen untuk mewujudkan cita-cita Pancasila harus menjadi dasar utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan harus dipikirkan dengan matang agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Para pemimpin pemerintahan tidak boleh dengan mudah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sehari-hari, serta harus mampu menjadi contoh bagi seluruh warga negara dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila tidak bisa terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan memperkuat. UUD 1945 memberikan kerangka hukum dan norma yang menjadi panduan dalam pelaksanaan negara, sementara Pancasila menghadirkan jiwa dan semangat yang menginspirasi setiap pasal dan ayat dalam konstitusi itu. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedua dokumen ini sangat penting bagi seluruh warga negara, khususnya para penyelenggara negara, agar dapat melaksanakan pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab, serta menjaga agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tidak menyimpang dari cita-cita luhur bangsa. Di tengah perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, pengertian terhadap nilai-nilai Pancasila seringkali mulai memudar dan tidak tercermin dalam tindakan dan perilaku. Hal ini menyebabkan masih banyak tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan pelanggaran, serta sebagian penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah tidak konsisten dan melupakan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan sistematis untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara, khususnya generasi muda, melalui pendidikan formal maupun

informal, sosialisasi, keteladanan, dan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, Pancasila harus menjadi pedoman moral yang mengarahkan setiap tindakan dan keputusan. Penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila tidak hanya difokuskan pada kebenaran formal atau kepastian hukum, tetapi juga pada kebenaran materiil yang adil dan beradab, serta dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menuntut para penegak hukum untuk memiliki integritas, kejujuran, keberanian, dan profesionalisme dalam menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Selain itu, etika politik yang berasal dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang terjamin dalam Pancasila juga wajib menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik ini harus menjadi dasar bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh para penyelenggara negara, serta menjadi panduan bagi seluruh warga negara dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kultur politik yang beradab, bermoral, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang tidak dapat digoyahkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia adalah identitas, jiwa, dan pandangan hidup masyarakat yang harus senantiasa dijaga, dilestarikan, dan diterapkan oleh seluruh warga negara. Dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan, Indonesia dapat terus maju dan berkembang sebagai bangsa yang besar, kuat, berdaulat, adil, makmur, dan dihormati di tengah pergaulan dunia.

Daftar Pustaka

- Aryani, E. D., Fadjrin, N., Azzahro', T. A., & Fitriono, R. A. (n.d.). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER*.
- Dwi Adityo, R. (2022). PENGUATAN DASAR NEGARA MELALUI PENYULUHAN PANCASILA PADA MAHASISWA.
- Faslah, R. (2024). IDENTITAS NASIONAL GEOSTRATEGI & GEOPOLITIK Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Hamja, B. (2017). PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI BANGSA.
- MD Mahfud, M. (2017). PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI. <http://repository.uin-malang.ac.id/2106/1/2106.pdf>
- Miftahusyai, M., Shofiyulloh Al Kamil, M., & Puji Mulyoto, G. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad yani Jabung. 9(2), 95–104. <http://repository.uin-malang.ac.id/10819/>